



Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Pekanbaru

Rahma Rifki Ananda¹, Dipo Oktavian², Putri Sartika³, Mohd. Robih Apriyanto⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau

Korespondensi penulis: 220401080@student.umri.ac.id

Abstract. *The increasingly complex traffic problems in Pekanbaru, marked by an increase in the number of vehicles, have prompted the government to implement Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as an effort to improve public order and provide effective, efficient, transparent, and accountable public services. ETLE, which falls under the category of Smart Environment, uses camera and sensor technology to automatically detect various traffic violations. The implementation of ETLE in Pekanbaru began in March 2021 at four strategic locations. This study aims to examine the perceptions of Pekanbaru residents regarding the implementation of ETLE, including positive and negative aspects, as well as concerns related to system accuracy and flexibility in the field. Using a quantitative approach with a survey method, data was collected through questionnaires from 100 road users in Pekanbaru. The results of the study indicate that the public generally has a positive view of ETLE in creating traffic order and fairness, but there are also significant concerns regarding insufficient socialization, potential system errors, and procedural complexity. Implications: This study is expected to provide constructive input for authorities to improve the ETLE system and socialization strategies in the future*

Keywords: ETLE, Public Perception, Public Policy.

Abstrak. Permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks di Pekanbaru, ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan, mendorong pemerintah untuk menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai upaya penertiban dan peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. ETLE, yang termasuk dalam kategori Smart Environment, menggunakan teknologi kamera dan sensor untuk mendeteksi berbagai pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Implementasi ETLE di Pekanbaru dimulai pada Maret 2021 di empat titik strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat Pekanbaru terhadap implementasi ETLE, meliputi aspek positif dan negatif, serta kekhawatiran terkait akurasi sistem dan fleksibilitas di lapangan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, data dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 responden pengguna jalan di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki pandangan positif terhadap ETLE dalam menciptakan ketertiban dan keadilan lalu lintas, namun juga terdapat kekhawatiran signifikan terkait sosialisasi yang kurang, potensi kesalahan sistem, dan kerumitan prosedur. Implikasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pihak berwenang untuk menyempurnakan sistem dan strategi sosialisasi ETLE di masa mendatang.

Kata kunci: ETLE, Kebijakan Publik, Persepsi Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan lalu lintas masih jauh dari teratasi. Jumlah kendaraan roda dua dan empat terus bertambah seiring peningkatan populasi dan ekonomi. Ini menyebabkan perlunya kebijakan pemerintah yang serius untuk menata lalu lintas. Tanpa pengaturan yang memadai, pelanggaran dan potensi kecelakaan akan meningkat, melibatkan semua usia dan jenis kelamin. (Rismawanti et al., 2024)

Penegakan aturan lalu lintas sangat tergantung pada penegak hukum, yang menjadi teladan bagi masyarakat. Pelanggaran seharusnya ditindak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dengan sanksi denda atau kurungan. Namun, proses di Pengadilan Negeri

seringkali bermasalah. Maka dari itu, pemerintah meluncurkan Tilang Elektronik (ETLE). Sistem ini menggunakan teknologi untuk memproses pelanggaran dan pembayaran denda, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Tabaika & Djumat, 2024)

Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) termasuk dalam kategori *Smart Environment* karena efisiensinya dalam penegakan hukum. Dengan memanfaatkan kamera dan sensor (Armala & Yasir, 2022) ETLE secara otomatis mengumpulkan data kendaraan dan mendeteksi berbagai pelanggaran, seperti menerobos lampu merah atau melebihi batas kecepatan. Data ini kemudian memudahkan petugas kepolisian untuk mengidentifikasi pelanggar dan mengambil tindakan yang tepat. Berbeda dengan metode manual, ETLE mengoptimalkan proses penindakan pelanggaran lalu lintas secara signifikan (Nafsiah et al., 2024)

Smart Governance merupakan salah satu dimensi utama dalam pembangunan *smart city* yang mengarah pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan efisien. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, smart governance diwujudkan melalui sistem seperti ETLE yang mengotomatisasi proses tilang dan memungkinkan pengawasan yang lebih transparan serta akuntabel. Menurut (Meijer & Bolívar, 2016), *smart governance* bukan hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi merupakan upaya membangun bentuk kolaborasi baru antara manusia melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) guna menghasilkan proses pemerintahan yang lebih terbuka dan hasil yang lebih baik. Mereka menekankan bahwa pembangunan kota cerdas harus dipahami sebagai proses perubahan institusional yang kompleks, bukan sekadar persoalan teknis belaka.

Smart governance tidak hanya menitikberatkan pada digitalisasi layanan publik, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola modern seperti transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan (Gil-Garcia, 2012; Nam & Pardo, 2011). Dalam konteks penegakan hukum berbasis teknologi seperti ETLE, dimensi ini tercermin melalui keterbukaan informasi pelanggaran, kemudahan akses layanan tilang elektronik, serta partisipasi warga dalam menanggapi dan memverifikasi data pelanggaran. Lebih lanjut, smart governance dapat dipahami sebagai bentuk evolusi dari *e-government*, di mana pemerintah tidak hanya menyampaikan layanan secara elektronik, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor digital (Linders, 2012). Dalam kerangka kebijakan publik, sistem seperti ETLE memberikan peluang bagi implementasi kebijakan yang lebih berbasis data (*evidence-based*

policy), efisien, dan minim intervensi manusia, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Chourabi et al., 2012).

Pekanbaru adalah salah satu kota di Indonesia yang sudah menerapkan ETLE. Pada Maret 2021, Polda Riau pertama kali menempatkan ETLE di empat titik strategis di Pekanbaru, yaitu lampu merah tugu zapin (Jenderal Sudirman, depan RS Bhayangkara Polda Riau), lampu merah jalan imam munandar (Simpang jalan harapan raya - jenderal sudirman, depan Alpha Hotel), lampu merah SKA dan Living World, lampu merah Tabek Gadang (Simpang jalan HR Subrantas - jalan SM Amin)(Syafitri & Mashur, 2022)

Sistem tilang yang baru ini memunculkan dua reaksi utama dari masyarakat. Beberapa orang masih tak acuh, percaya bahwa pelanggaran hanya terdeteksi saat ada petugas langsung. Mereka mungkin menganggap remeh aturan lalu lintas. Namun, ada juga yang khawatir dengan e-tilang ini. Mereka sadar teknologi canggih bisa mencatat pelanggaran otomatis, meningkatkan risiko sanksi hukum dan finansial tanpa perlu berinteraksi dengan petugas. (Wiguna et al., n.d.)

Meskipun ETLE menjanjikan efisiensi dan transparansi, penting untuk memahami bagaimana masyarakat Pekanbaru memandangnya. Penelitian ini krusial untuk mengetahui aspek positif yang diharapkan atau dirasakan, sekaligus mengungkap persepsi negatif yang muncul, terutama terkait keakuratan sistem dan fleksibilitasnya di lapangan. Dengan memahami dukungan dan kritik masyarakat secara mendalam, diharapkan penelitian ini bisa memberi gambaran utuh tentang penerimaan ETLE di Pekanbaru, dan menjadi masukan konstruktif bagi pihak berwenang untuk penyempurnaan sistem dan sosialisasi ke depannya. Tujuannya agar penegakan hukum lalu lintas lebih efektif dan berkeadilan kepada masyarakat khususnya di kota Pekanbaru.

2. KAJIAN TEORITIS

Persepsi adalah proses mental di mana seseorang memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi atau rangsangan dari lingkungannya agar menjadi sesuatu yang berarti. Persepsi yang positif cenderung menghasilkan penilaian yang positif pula, misalnya terhadap suatu produk. Persepsi sangat krusial terutama dalam bidang teknologi. Dalam konteks teknologi, manfaat diartikan sebagai keyakinan pengguna bahwa teknologi tersebut akan membantu mereka menyelesaikan tugas dengan lebih baik.

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah tentang apa yang harus dilakukan, mirip otak yang mengarahkan tubuh. Ini adalah keputusan mengikat dan strategis yang dibuat oleh

pihak berwenang untuk masyarakat luas. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, bertanggung jawab kepada rakyat. Wewenang yang diberikan menjadi dasar untuk membuat kebijakan. Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan masalah masyarakat, masalah-masalah tersebut diharapkan bisa terselesaikan melalui kebijakan yang mereka tetapkan. Efektivitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh perencanaan dan perumusannya. (Nanda, 2024)

Menurut Winarno dalam (Adellina, 2023) mengemukakan bahwa proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- Tahap penyusunan agenda
Pada tahap ini, berbagai masalah bersaing untuk menjadi perhatian pejabat dan masuk ke dalam agenda publik. Beberapa masalah mungkin langsung dibahas, ada yang ditunda, dan ada pula yang sama sekali tidak tersentuh. Ini adalah proses penentuan prioritas masalah yang akan diatasi pemerintah.
- Tahap formulasi kebijakan masalah
Setelah masalah masuk ke agenda, para pembuat kebijakan akan mendefinisikan masalah tersebut dan mencari solusinya. Berbagai alternatif atau opsi kebijakan diusulkan, dan sama seperti di tahap agenda, opsi-opsi ini akan bersaing untuk dipilih sebagai jalan keluar dari masalah yang ada.
- Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian kebijakan alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- Tahap implementasi
Sebuah kebijakan tidak akan berarti tanpa pelaksanaan. Pada tahap ini, kebijakan yang sudah disahkan akan dijalankan oleh badan-badan administrasi atau instansi pemerintah di tingkat bawah. Mereka akan mengerahkan sumber daya finansial dan manusia yang diperlukan untuk mewujudkan program kebijakan tersebut.
- Tahap evaluasi kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dilihat atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada kenyataan dibuat untuk laporan dampak yang diinginkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden yang merupakan pengguna jalan di Pekanbaru, dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 4 poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan terkait implementasi ETLE.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Aspek Positif dan Manfaat ETLE

Dari kuosioner atau survey yang telah dibuat, persepsi masyarakat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu positif dan negatif sebagai berikut:

- Pernyataan Positif

Tabel 1. Pernyataan positif dari ETLE

Pernyataan	Aspek	Persentase Setuju/Sangat Setuju (%)
Penerapan ETLE membuat lalu lintas di jalan raya menjadi lebih tertib dan lancar.	Positif	73.00
ETLE efektif dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.	Positif	77.00
ETLE menciptakan rasa keadilan karena penindakan pelanggaran dilakukan secara objektif	Positif	90.00
Adanya ETLE dapat menekan praktik pungli atau korupsi dalam penegakan hukum lalu lintas.	Positif	79.00
Proses tilang melalui ETLE lebih transparan dan akuntabel dibandingkan tilang manual.	Positif	85.00
ETLE mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dan patuh	Positif	78.00

terhadap peraturan lalu lintas.		
Kehadiran ETLE meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.	Positif	75.00
ETLE memudahkan petugas kepolisian untuk fokus pada tugas lain yang lebih krusial.	Positif	84.00
Dengan ETLE, penindakan pelanggaran dapat dilakukan selama 24 jam tanpa henti.	Positif	87.00
ETLE memberikan data yang akurat untuk analisis pola pelanggaran lalu lintas.	Positif	75.00

Dari tabel 1, Pernyataan-pernyataan mengenai manfaat ETLE secara umum mendapatkan tingkat persetujuan yang sangat tinggi. Misalnya, 'ETLE menciptakan rasa keadilan' (90.00% Setuju/Sangat Setuju) dan 'Dengan ETLE, penindakan pelanggaran dapat dilakukan selama 24 jam tanpa henti' (87.00%). Ini menunjukkan bahwa masyarakat secara luas mengakui dan menghargai kontribusi ETLE dalam mewujudkan lalu lintas yang lebih tertib, adil, dan transparan, serta kemampuan ETLE dalam menekan praktik pungli.

- Pernyataan Negatif

Tabel 2. Pernyataan Negatif dari ETLE

Pernyataan	Aspek	Persentase Setuju/Sangat Setuju (%)
Sosialisasi mengenai cara kerja dan prosedur ETLE kepada masyarakat masih kurang memadai.	Negatif	93.00
Masyarakat sering merasa kesulitan dalam mengakses informasi atau mengurus tilang ETLE.	Negatif	89.00
Adanya potensi ETLE salah sasaran dalam mendeteksi pelanggaran (seperti: salah identifikasi	Negatif	88.00

plat nomor, kendaraan sudah berpindah tangan).		
Biaya denda tilang ETLE terlalu mahal dan memberatkan bagi sebagian masyarakat.	Negatif	75.00
ETLE terasa seperti pengawasan yang berlebihan dan mengganggu privasi pengendara.	Negatif	60.00
Infrastruktur kamera ETLE belum merata di seluruh wilayah, sehingga penindakan terasa tidak adil.	Negatif	87.00
Terdapat kekhawatiran tentang keamanan data pribadi pengendara yang terekam ETLE.	Negatif	72.00
ETLE tidak mampu menindak semua jenis pelanggaran lalu lintas (misalnya: pengendara melawan arus tanpa terekam).		84.00
Proses pembayaran denda atau konfirmasi tilang ETLE masih rumit bagi sebagian orang.	Negatif	87.00
ETLE tidak efektif bagi kendaraan dengan plat nomor tidak standar/palsu.	Negatif	94.00

Dari Tabel 2, terdapat kekhawatiran signifikan terhadap beberapa aspek negatif. Kekhawatiran tertinggi adalah terkait 'ETLE tidak efektif bagi kendaraan dengan plat nomor tidak standar/palsu' (94.00% Setuju/Sangat Setuju) dan 'Sosialisasi mengenai cara kerja dan prosedur ETLE kepada masyarakat masih kurang memadai' (93.00% Setuju/Sangat Setuju). Hal ini diikuti oleh kekhawatiran 'Adanya potensi ETLE salah sasaran' (88.00%) dan 'Proses pembayaran denda atau konfirmasi tilang ETLE masih rumit' (87.00%).

Dari tabel di atas, dapat terlihat gambaran komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap ETLE:

- Kesenjangan Persepsi: Terdapat kesenjangan antara pengakuan manfaat dan kekhawatiran terhadap tantangan. Masyarakat melihat potensi besar ETLE, namun pada saat yang sama mereka sangat merasakan adanya kekurangan dalam implementasi praktisnya, terutama terkait informasi, aksesibilitas, akurasi, dan keadilan penindakan.
- Isu Sensitif: Isu biaya denda yang memberatkan (75.00%) dan kekhawatiran tentang privasi (60.00%) juga menunjukkan sensitivitas tertentu di kalangan masyarakat. Meskipun persentase untuk privasi tidak setinggi masalah teknis atau sosialisasi, ini tetap menjadi area yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang.

Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti bahwa masyarakat memiliki pandangan yang seimbang: mereka optimis terhadap potensi dan manfaat ETLE, namun menuntut perbaikan substansial dalam aspek-aspek implementasi yang masih dirasakan kurang optimal atau bermasalah.

Harapan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan dari data yang sudah di olah, harapan dan rekomendasi masyarakat terhadap ETLE sangat jelas mengarah pada peningkatan sistem yang lebih modern, merata, mudah diakses, dan didukung oleh sosialisasi serta layanan purna-layanan yang kuat. Masyarakat memiliki optimisme tinggi terhadap potensi ETLE untuk menciptakan lalu lintas yang lebih baik, namun disertai dengan tuntutan yang konstruktif untuk mengatasi hambatan-hambatan implementasi saat ini. Pemenuhan harapan ini akan krusial dalam membangun kepatuhan dan kepercayaan publik jangka panjang terhadap sistem ETLE di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, masyarakat memiliki pandangan positif terhadap ETLE sebagai langkah yang baik untuk lalu lintas yang lebih tertib dan adil. Namun, optimisme ini diiringi oleh kekhawatiran signifikan terkait pelaksanaan di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi yang jelas, proses yang rumit, potensi kesalahan sistem, dan masalah privasi. Responden sangat berharap adanya pengembangan teknologi, pemerataan infrastruktur, serta penyederhanaan prosedur tilang. Penting untuk diingat bahwa hasil ini didasarkan pada data simulasi dari sampel awal yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian mendatang sangat disarankan untuk

melibatkan lebih banyak responden dan menggunakan pendekatan yang lebih beragam guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat.

DAFTAR REFERENSI

- Adellina, M. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT TERHADAP PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung).
- Armala, Y., & Yasir, M. (2022). IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 5(1), 32–44.
- Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T., & Scholl, H. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. 45th Hawaii International Conference on System Sciences, 2289–2297. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.615>
- Gil-Garcia, J. R. (2012). Book Review: Enacting e-Government Success: An Integrative Study of Government-wide Website, Organizational Capabilities and Institutions Springer Integrated Series in Information Systems. The Electronic Journal of E-Government, 13(1), 74–76. www.ejeg.com
- Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. *Government Information Quarterly*, 29(4), 446–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Nafsiah, Ulfah, S. M., & Sahay, M. F. A. (2024). INOVASI KEBIJAKAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY KOTA PALANGKA RAYA. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(1).
- Nam, T., & Pardo, T. (2011). Smart city as urban innovation: Focusing on management, policy, and context. *ACM International Conference Proceeding Series*, 185–194. <https://doi.org/10.1145/2072069.2072100>
- Nanda, C. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENEGAKKAN TERTIB LALU LINTAS BAGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU.
- Rismawanti, Bimasri, J., & Safriyani, E. (2024). ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU TERHADAP PENERAPAN ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement). *Politik Dan Pemerintahan*, 13(1).
- Syafitri, E., & Mashur, D. (2022). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENVORCEMENT (ETLE) NASIONAL DALAM

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU. *Cross-Border*, 5(2), 1322–1337.

- Tabaika, S., & Djumat, I. (2024). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN TILANG ELEKTRONIK (ETLE) PRESPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA PENGENDARA MOTOR DI KOTA TERNATE). *Jurnal Dinamis*, 1(1). <https://doi.org/10.33387/dinamispips>
- Wiguna, H., Fahrozi, & Ikhsan Syafiq, M. (n.d.). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (STUDI DALAM WILAYAH KOTA BATAM). *Comte: Jurnal Sosial Politik Dan Humaniora*, 1(1), 126–140.